



KOLABORASI DINDUKCAPIL DAN PENGADILAN AGAMA YOGYA

Inovasi 'Pungkasi', Urus Cerai Sekaligus Tertib Adminduk

YOGYA (KR) - Pengadilan Agama Yogyakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya resmi meluncurkan inovasi berupa 'Pungkasi' atau Pisan Pengurusan Kantoran Statusipun. Melalui inovasi tersebut setiap pengurusan perceraian akan langsung tertib administrasi kependudukan (adminduk).

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, menyebut setiap pernikahan yang akhirnya terpaksa berakhir dengan perceraian akan memberikan dampak panjang dalam adminduk. "Misalnya nanti akan ada kartu keluarga (KK) baru karena KK lama hangus demi hukum. Itu akan berimbas pula pada status anak, status kepegawaian, pemisahan harta bersama dan lainnya. Jadi rentetannya panjang," sebutnya di sela peluncuran inovasi Pungkasi di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta, Senin (15/7).

Oleh karena itu ketika terjadi alih status cerai hidup yang langsung diikuti dengan tertib adminduk maka akan memberikan dampak positif. Apalagi adminduk merupakan hak setiap masyarakat serta banyak aspek yang tidak bisa dilepaskan dari administrasi kependudukan.

Sehingga dirinya juga menjamin setiap pengurusan adminduk tidak pernah dipungut biaya dan dilayani secepat-cepatnya. "Harapannya, kolaborasi ini bisa dikembangkan ke aspek lain. Misalnya bagi yang menikah siri dan memiliki anak maka adminduknya harus ada solusi," tandasnya.

Kepala Dindukcapil Kota Yogya Septi Sri Rejeki, menjelaskan melalui inovasi Pungkasi maka setiap perceraian di Pengadilan Agama yang telah inkrah akan langsung diinformasikan ke instansinya. Selanjutnya dokumen itu menjadi dasar perubahan status dalam KK maupun KTP elektronik. Pihaknya juga langsung mencetak KK dan KTP elektronik baru kemudian diserahkan kembali ke Pengadilan Agama Yogyakarta. "Saat itu juga Pengadilan Agama akan menyerahkan akta perceraian sekaligus

dengan KK dan KTP elektronik baru dengan status cerai hidup. Jadi pemohon tidak perlu lagi melapor ke Dindukcapil melainkan petugas yang berjalan. Itu ruh dari pelayanan," urainya.

Sebelumnya, perceraian yang telah inkrah tidak lantas dilaporkan ke Dindukcapil. Dari hasil pengamatannya, dari 20 permohonan perceraian yang inkrah hanya dua pemohon yang melapor ke Dindukcapil. Akibatnya banyak pasangan yang sebenarnya telah cerai namun KK dan KTP-nya masih berstatus menikah. Hal ini pun bisa berimbas pada program yang berkaitan dengan adminduk seperti kepegawaian maupun bantuan pemerintah yang menjadi tidak tepat sasaran.

Menurutnya, dengan tertib adminduk yang dimulai dari tertib pelaporan perceraian akan terwujud pelayanan yang berkualitas, akuntabel

dan transparan. Inovasi itu pun sudah diujicoba sejak 10 Juni lalu dengan 20 pemohon perceraian yang telah inkrah. Selanjutnya hingga pertengahan bulan ini terdapat 14 pemohon, yang semuanya langsung mendapatkan akta perceraian, KK dan KTP elektronik sekaligus.

Sementara Kepala Pengadilan Agama Yogyakarta Khoiriyah Roihan, mengaku kolaborasi antarinstansi pemerintah sangat dibutuhkan. Pihaknya pun berharap kelak ada kerja sama lanjutan yang mampu mendukung pelayanan masyarakat. Sesuai

target, pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan murah.

"Salah satu tupeksi kita adalah sengketa perkawinan. Mulai perceraian kemudian hak asuh anak, diikuti pula harta bersama yang itu panjang sekali. Makanya yang kita kedepankan ialah mediasi agar terjadi kesepakatan bersama dalam mediasi itu. Tetapi pertengkaran itu kan sesuatu yang rumit," katanya.

Meski demikian, hadirnya inovasi Pungkasi diharapkan tidak sebatas memberikan



KR-Ardhi Wahdan

Pj Walikota Yogya menyerahkan akta perceraian dan dokumen adminduk sekaligus peluncuran simbolis inovasi Pungkasi.

kemudahan bagi pemohon melainkan juga peningkatan kualitas birokrasi. Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah menyandang status zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), kini pun tengah mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBEM). **(Dhi-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005